

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Kebijakan Perbankan Pasca Krisis 1998**

Krisis keuangan yang terjadi di Asia mulai pertengahan tahun 1997 telah memicu krisis perbankan di beberapa negara Asia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, krisis diawali dengan dilikuidasinya beberapa bank yang berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat yang tercermin dari penarikan secara besar-besaran dana masyarakat dari bank. Kondisi tersebut menyebabkan uang kartal yang dipegang masyarakat melonjak tajam dari Rp. 24,9 triliun pada akhir Oktober 1997 menjadi Rp. 37,5 triliun pada akhir Januari 1998 dan jumlah ini terus meningkat hingga puncaknya pada bulan Juli 1998 yang mencapai Rp. 45,4 triliun.

Kepanikan masyarakat tersebut menyebabkan tekanan yang berat terhadap posisi likuiditas perbankan. Beberapa bank yang sebelumnya tergolong sehat dan merupakan pemasok dana juga terkena imbas. Akibatnya hampir seluruh bank umum nasional menghadapi kesulitan likuiditas dalam jumlah sehingga melanggar ketentuan Giro Wajib Minimum dan mengalami saldo negatif atas rekening gironya di BI.

Oleh karena itu, untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, maka pemerintah dan Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan berupa

pemberian dana talangan kepada bank-bank yang mengalami *rush*, pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional atau BPPN dan restrukturisasi perbankan.

**a. Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)**

BPPN merupakan satu lembaga yang dibentuk berdasarkan Kepres No.27 pada tanggal 27 Februari Tahun 1998 tentang Pembentukan BPPN dengan tujuan penyehatan perbankan di Indonesia (PSSK Bank Indonesia, 2003 : 162). Pendirian BPPN hanya bersifat sementara dan berlaku selama lima tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu sepanjang masih diperlukan untuk menjalankan tugasnya. BPPN memiliki tiga tugas pokok, yaitu : melakukan penyehatan perbankan; menyelesaikan aset bermasalah; dan mengupayakan pengembalian uang negara yang telah tersalur pada sektor perbankan.

**b. Restrukturisasi Perbankan**

Melalui program ini, industri perbankan yang lumpuh karena krisis, dapat dipulihkan secara bertahap sehingga dapat kembali berfungsi dalam memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkan kredit kepada dunia usaha. Pulihnya sistem perbankan diperlukan untuk mendukung efektivitasan kebijakan moneter. Demikian juga sebaliknya, kebijakan moneter diharapkan dapat mempercepat upaya restrukturisasi perbankan. Pada dasarnya program restrukturisasi perbankan tersebut ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi perbankan karena krisis dan sekaligus membangun kembali sistem perbankan yang sehat dan kuat untuk mencegah terulangnya krisis di masa mendatang.

1) Program Penyehatan Perbankan

Program penyehatan perbankan berupaya untuk menyelesaikan persoalan perbankan yang meliputi likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Sesuai dengan persoalan yang dihadapi tersebut, program penyehatan perbankan meliputi program penjaminan, program rekapitalisasi dan program restrukturisasi kredit.

a) Program Peminjaman

Program ini merupakan upaya utama dalam rangka menstabilkan perbankan setelah mengalami krisis kepercayaan. Program penjaminan secara bertahap mampu mengurangi krisis kepercayaan yang dialami perbankan. Hal ini ditunjukkan oleh berkurangnya penarikan dana besar-besaran (*rush*) dari perbankan.

b) Program Rekapitalisasi Bank Umum

Program ini ditujukan untuk menyetatkan industri perbankan sehingga mampu memaksimalkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional secara sehat. Inti program rekapitalisasi adalah penyertaan modal oleh pemerintah dalam bentuk obligasi kepada bank-bank yang mengalami kesulitan modal.

c) Program Restrukturisasi Kredit

Program restrukturisasi kredit merupakan penyelesaian kredit bermasalah yang mengalami lonjakan yang sangat tajam pada masa pasca krisis tahun 1997. Permasalahan menjadi kompleks karena penyelesaian kredit bermasalah pada perbankan terkait langsung dengan permasalahan utang luar negeri swasta. Ada beberapa permasalahan yang dialami dalam rangka restrukturisasi kredit antara lain adalah pelaksanaan teknis dari bank yang kurang mampu transparan dan

debitur yang mengajukan tuntutan berlebih. Untuk itu, guna mendorong percepatan pelaksanaan beberapa kegiatan, antara lain dengan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tenaga perbankan baik di Jakarta maupun didaerah, serta membentuk suatu program klinik restrukturisasi kredit khusus untuk kredit-kredit usaha kecil dan menengah.

## 2) Program Peningkatan Ketahanan Perbankan

Upaya peningkatan ketahanan perbankan dilakukan melalui :

### a) Pengembangan Infrastruktur

Pada masa krisis perbankan, bank-bank yang berbentuk BPR cenderung selamat dari krisis, karena bank-bank ini memilih debitur yang berasal dari pengusaha kecil dan menengah sehingga tidak banyak bergantung pada impor. Pada bank konvensional, permasalahan likuiditas perbankan yang dicerminkan meningkatkan suku bunga secara tajam diikuti beban bunga yang harus dikeluarkan oleh bank. Sedangkan untuk bank syariah yang berprinsip bagi hasil, meningkatnya suku bunga tidak secara langsung menyebabkan meningkatnya beban biaya yang harus dikeluarkan oleh bank. Oleh karena itu perbaikan struktur perbankan dilakukan dengan jalan pengembangan BPR, dan pengembangan bank berdasarkan prinsip syariah. Selain itu untuk menjaga kepercayaan masyarakat maka dibentuklah LPS sebagai pelengkap pengembangan infrastruktur perbankan Indonesia.

### b) Peningkatan Good Corporate Government

Tugas utama komite ini adalah merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional *corporate government corporate government* yang mencakup

pedoman GCG. GCG ini selanjutnya dilakukan melalui *fit and proper test* terhadap pemilik dan pengurus bank, penerapan wawancara bagi calon pemilik dan pengurus bank, penunjukkan direktur kepatuhan dan investigasi tindak pidana di bidang pidana.

c) Penyempurnaan Ketentuan Perbankan

Penyempurnaan ketentuan perbankan dimaksudkan untuk memperkecil industri perbankan nasional dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

d) Pemantapan Pengawasan Bank

Perbaikan pelaksanaan pengawasan yang ditempuh antara lain mencakup di bidang pengawasan, peningkatan integritas, dan kompetensi sumber daya manusia serta pembentukan khusus investigasi penyimpangan di bidang perbankan.

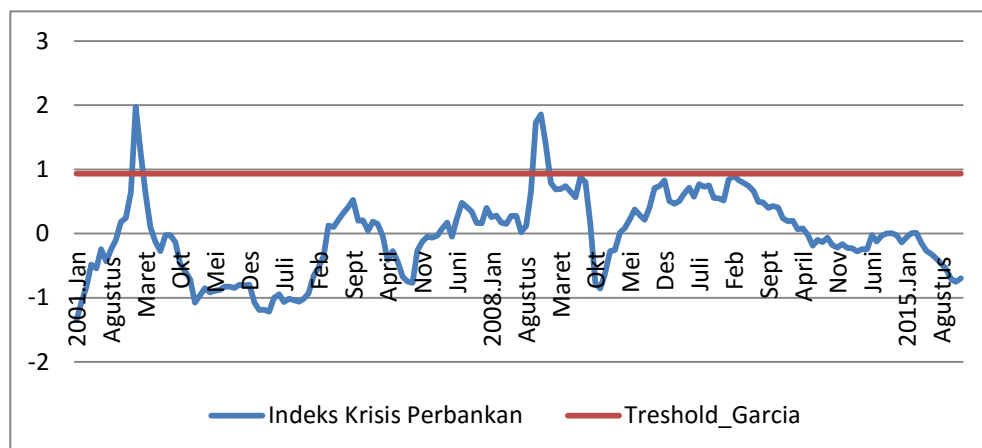
3) Kebijakan Penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

Dalam keadaan kesulitan likuiditas, pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan penyelamatan dengan cara pemberian BLBI. Dari sisi yuridis, penyaluran BLBI didasarkan pada UU. No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral dan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. Pasal 32 ayat (3) menyebutkan “Bank dapat juga memberikan kredit likuiditas pada bank-bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat”.

## B. Analisis Pergerakan Variabel Penelitian

### 1. Variabel Indeks Tekanan Perbankan

Berikut ini adalah pergerakan data Indeks Tekanan Perbankan / ITP periode 2001-2015.



Sumber : Data Diolah

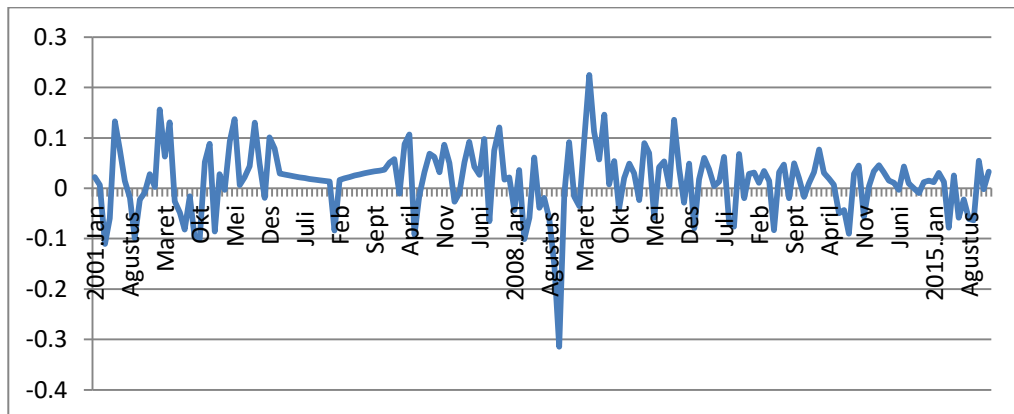
**Gambar 4.1**

Pergerakan Variabel Indeks Krisis Perbankan 2001-2015

Pada 2001 – 2003 perbankan mulai stabil karena restrukturisasi perbankan terus dilakukan sebagai upaya untuk mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat dan sektor riil mendukung upaya proses pemulihan tersebut. Indeks Tekanan Perbankan mulai meningkat dari tahun 2007 yakni tahun awal terjadinya krisis global tahun 2008. Pada tahun 2015, nilai tukar dolar Amerika Serikat semakin menguat terhadap beberapa mata uang negara lain, termasuk Indonesia. Hal tersebut merupakan sinyal awal munculnya krisis keuangan global dan menyebabkan Indeks Krisis Perbankan semakin meningkat.

## 2. Variabel IHSG

Berikut ini adalah pergerakan data IHSG periode Januari 2001 sampai dengan Desember 2015.



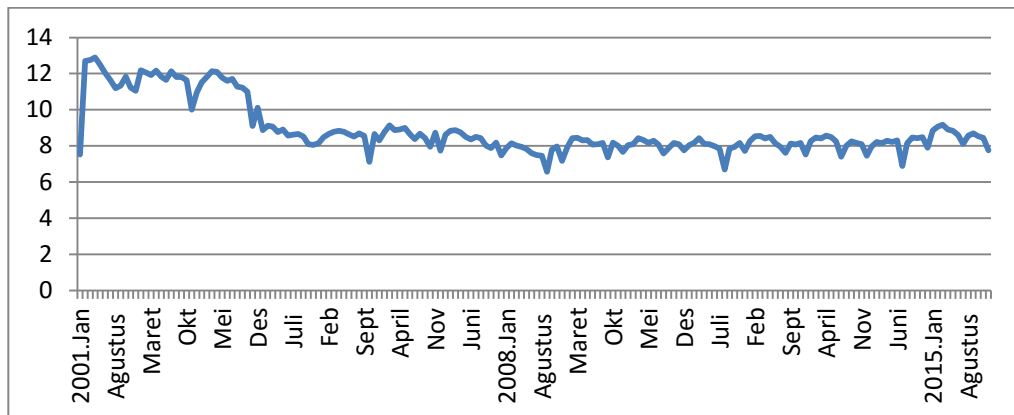
Sumber : Data Diolah

**Gambar 4.2**  
Pergerakan Variabel IHSG  
2001-2015

Nilai IHSG mulai dari tahun 2001 terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2008 terjadi fluktuasi yang cukup tajam dikarenakan imbas dari krisis global. Pada akhir Agustus 2008, IHSG ditutup pada level 2165,9 atau melemah 6,01 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pelemahan IHSG tersebut disebabkan oleh gejolak eksternal yang bersumber dari permasalahan di bursa global. Tahun 2013 IHSG kembali mengalami penurunan dikarenakan krisis mata uang dunia dan di Tahun 2015 IHSG juga kembali mengalami penurunan dikarenakan menguatnya nilai tukar dolar AS. Bisa disimpulkan jika IHSG menurun seiring dengan menurunnya nilai Rupiah.

### 3. Variabel M2 Multiplier

Berikut ini adalah pergerakan M2 multiplier periode Januari 2001 sampai dengan Desember 2015.



Sumber : Data Diolah

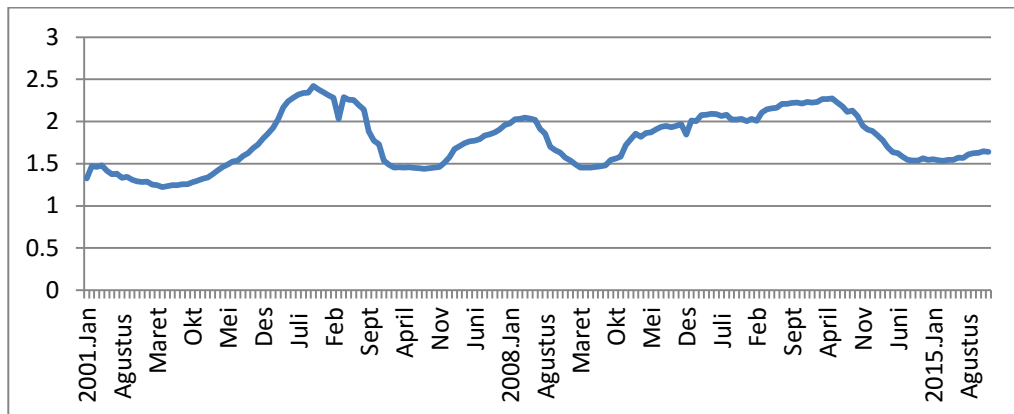
**Gambar 4.3**  
Pergerakan Variabel M2 Multiplier 2001-2015

Jumlah M2 multiplier pada bulan Januari 2001 sampai dengan Desember 2015 cenderung stabil dan terus mengalami peningkatan. Tidak ada peningkatan atau penurunan yang signifikan terhadap pergerakan variabel ini. Jumlah terkecil M2 ada pada Januari 2001 yakni 738.731 dan jumlah terbesar pada Desember 2015 yakni sejumlah 4.548.800.

### 4. Variabel Rasio Bunga Pinjaman dan Tabungan

Berikut ini adalah pergerakan variabel rasio bunga pinjaman dan tabungan periode Januari 2001 sampai dengan Desember 2015.





Sumber : Data Diolah

#### Gambar 4.4

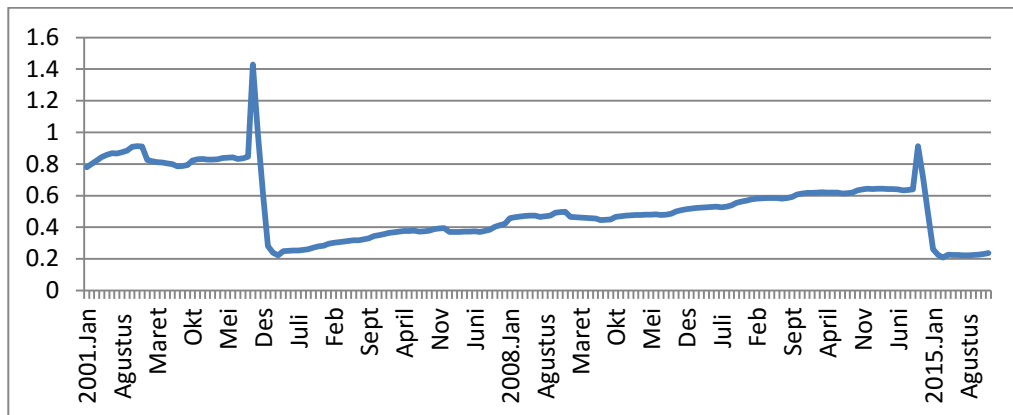
Pergerakan Variabel Rasio Bunga Pinjaman dan Tabungan 2001-2015

Nilai rasio bunga pinjaman dan tabungan pada tahun 2001-2015 cenderung mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Pada tahun 2006 suku bunga pinjaman cenderung meningkat namun suku bunga simpanan mengalami fluktuasi, hal tersebut dikarenakan BI rate bulan Juni berada pada level 12,5% dan cenderung turun mengingat inflasi mengalami penurunan hingga mencapai 7,3% pada akhir 2006.

Krisis keuangan pada tahun 2008 menyebabkan peningkatan pada BI rate yang berfungsi untuk meredam inflasi yang disebabkan oleh turunnya nilai rupiah terhadap dolar. Hal tersebut meningkatkan daya tarik untuk menyimpan dana di bank namun sebaliknya bagi para investor yang enggan meminjam sejumlah uang karena akan mendapatkan beban bunga yang lebih tinggi. Nilai rasio bunga pinjaman dan simpanan tertinggi ada pada posisi 3,09 sedangkan terendah ada pada angka 1,23.

## 5. Variabel Rasio Konsumsi Pemerintah dengan PDB

Berikut ini adalah pergerakan variabel rasio konsumsi pemerintah dengan PDB periode Januari 2001 sampai dengan Desember 2015.



Sumber : Data Diolah

**Gambar 4.5**

Pergerakan Variabel Rasio Konsumsi Pemerintah dengan PDB

2001-2015

Nilai variabel rasio konsumsi pemerintah dengan PDB mengalami penurunan yang cukup tajam pada 2004 dan 2015. Rasio tertinggi ada pada angka 1,42 yakni pada Oktober 2003. Pada tahun 2003 pertumbuhan ekonomi memang meningkat dari 4,50% menjadi 4,78% namun konsumsi pemerintah cenderung menurun dikarenakan meningkatnya suku bunga simpanan. Pada tahun 2015 variabel rasio konsumsi pemerintah dengan PDB juga menurun drastis dikarenakan lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal I 2015 yang hanya mencapai 4,71 persen dibanding tahun lalu 5,17 persen. Hal tersebut merupakan imbas dari menurunnya konsumsi pemerintah sebesar 48,68 persen

yang disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan belanja modal. Selain itu turunnya ekspor dan impor juga mempengaruhi PDB.